

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Keadaan Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu selain merupakan pusatkegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusatkegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karenamerupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatra dan Pulau Jawa sehinggamenguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusatperdagangan, industri, dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020' sampai dengan 50 30' Lintang Selatan dan 1050 28' sampai dengan 105 037' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha(197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung bebatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di ProvinsiLampung, yaitu:

- a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara.
- b. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan)serta Teluk Lampung di sebelah Selatan.
- c. Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) di sebelah Barat.
- d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Timur.

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013)

2. Keadaan Administratif Kota Bandar Lampung

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun 7 kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari :

- a. Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton.
- b. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.
- c. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Sukarame.
- d. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- e. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- f. Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Barat.
- g. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan.

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013)

3. Keadaan Penduduk Kota Bandar Lampung

Berdasarkan sensus BPS, Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 881.801 jiwa (sensus 2010), dengan luas wilayah sekitar 197,22 km², maka Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 4.471 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun.

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013)

4. Keadaan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Ditinjau dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai daerah ini pada tahun 2006 sebesar 5.103.379 (dalam jutaan rupiah) dengan kontribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,12%, disusul kemudahan dari sektor bank/ keuangan 17,50%, dan dari sektor industri pengolahan 17,22%. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota Bandar Lampung hingga tahun 2006 sebesar 4.581.640 ton, dengan kontribusi terbesar datang dari komoditi kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu (1524 ton).

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa cengkeh, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah disektor industri pengolahan. Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan, industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, pisang menjadi keripik pisang, dan lada.

Hasil industri ini kemudian menjadi komoditi perdagangan dan ekspor. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa.

Sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan, Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Dewasa ini terdapat beberapa supermarket yang cukup besar. Pusat perbelanjaan modern yang terdapat di Bandar Lampung diantaranya adalah Simpur Center, Chandra Super-Store, Central Plaza Lampung (yang terdiri dari Hypermart dan Matahari), Gelael, Giant, Mal Kartini (terdiri dari Giant dan Centerpoint), Ramayana Lestari Sentosa, Toko Buku Gramedia dan Fajar Agung. Saat ini sedang dibangun mal baru di luar pusat kota/Tanjung Karang, yaitu Boemi Kedaton Mall di Kecamatan Kedaton serta dibangun juga Giant Hipermarket Antasari di Jalan Pangeran Antasari.

Sedangkan pusat perbelanjaan tradisional ternama diantaranya Pasar Bambu Kuning (pasar legendaris), Bambu Kuning *Square*, Tengah, Bawah, Pasirgantung, Smep, Mambo, Kangkung, Tugu, Panjang, dan Perumnas Way Halim. Berikut adalah daftar perusahaan besar yang terletak di Bandar Lampung

(Sumber: www.kotabandarlampung.go.id. Tahun 2013)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, maka diketahui bahwa Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional maupun regional. Posisi Kota Bandar Lampung terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengembalian peran dalam kerjasama regional *Indonesia – Malaysia – Singapura Growth Triangle* (IMS-GT) maupun dalam menyongsong pasar bebas AFTA. Dari segi jarak, kedudukan Kota Bandar Lampung terhadap kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabotabek, Banten, serta Jawa Barat menjadikannya salah satu pilihan bagi relokasi dan tempat limpahan kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut. Bandar Lampung menjadi bagian dari poros pertumbuhan Pantai Utara Jawa dan bagian dari proses perkembangan Pulau Jawa Bagian Barat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, fungsi Kota Bandar Lampung adalah:

1. Pusat kegiatan nasional yang bercirikan:
 - a) Sebagai pusat yang mendorong kawasan sekitarnya untuk mengembangkan sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, dan perikanan.

- b) Daerah jalur alternatif perlintasan ke kawasan nasional (Pulau Sumatera) dan internasional.
 - c) Simpul transportasi nasional melalui Pelabuhan Panjang.
 - d) Basis produksi nasional. Hal ini menjadikan Bandar Lampung potensial sebagai pusat distribusi barang dan jasa untuk Sumatera Bagian Selatan
2. Pusat kegiatan wilayah sebagai:
- a) Pusat-pusat pertumbuhan baru (*sub-urban*) seperti Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Gedong Tataan, Pringsewu dan Padang Cermin.
 - b) Pusat perdagangan, pusat jasa transportasi, pusat pengembangan hortikultura
 - c) Pusat pariwisata, pusat industri berbagai kerajinan dan bahan industry pertanian, pusat kebudayaan dan agama serta pusat penyediaan energi.
2. Salah satu kawasan andalan nasional di Propinsi Lampung
- Yaitu Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dan sekitarnya (KA BLMS) yang berperan sebagai sentra agribisnis dan agroindustri unggulan berbasis potensi sumberdaya lokal yang berdaya saing tinggi di tingkat regional, nasional, maupun global.

Menurut laporan rencana tata ruang wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2004 disebutkan luas wilayah terbangun Kota Bandar Lampung Tahun 2002 adalah 6.448,9 Ha atau 33,55 % dari total luas wilayah kota. Kebutuhan pengembangan ruang terbangun kota hingga 2015 adalah sebesar 4.782,37 Ha. Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebagai lokasi keberadaan Kawasan Pusat Kota/Cental Bussines Distric (CBD) Bandar Lampung

mempunyai luas 567 Ha, dengan luas kawasan terbangunnya mencapai 478,76 Ha atau 84,44% dari total luas kecamatan. Potensi pengembangan kawasan seluas 132,26 Ha atau 23,33% dari total luas Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Pemanfaatan ruang di pusat Kota Bandar Lampung adalah digunakan sebagai lokasi berdirinya bangunan-bangunan gedung (pertokoan-perkantoran, bank, dan hotel) juga dipakai sebagai kawasan perumahan, tempat badan jalan, dan sebagian dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi (sumber air dan kawasan hijau perbukitan). Di kawasan CBD, penggunaan lahan bercampur antara struktur fisik gedung-gedung pertokoan-perkantoran dengan bangunan rumah-rumah penduduk dan kios-kios Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemakaian lahan dan rencana kebutuhan luas untuk pengembangan infrastruktur sarana jalan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2005 seluas 456,44 Ha dan terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 493,52 Ha di Tahun 2015.

B. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung

Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung merupakan sektor informal yang mampu bertahan hidup dibandingkan sektor usaha lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal lebih independen atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan, dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sektor informal telah menjadi pusat perhatian para perencana pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Sektor informal dipandang merupakan salah satu alternatif yang cukup penting dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dalam beberapa periode terakhir ini, sektor informal di perkotaan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja di kota yang semakin lama semakin meningkat. Pertambahan angkatan kerja di kota juga disebabkan karena urbanisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada. Akibatnya tidak sedikit yang datang ke kota hanya akan menambah pengangguran, terutama di kalangan penduduk usia muda dan alternatif kesempatan kerja yang dapat diambil adalah masuk dalam usaha sektor informal

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah kebawah.

PKL di Kota Bandar Lampung sebagai sektor informal cukup efisien dalam berbagai kegiatannya karena mampu menyediakan kebutuhan yang murah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sektor informal timbul di masyarakat karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung diluar sektor yang terorganisasikan. Akibatnya para pendatang yang tidak dapat masuk ke sektor formal terlempar ke luar, kemudian berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Karena itu sektor informal dikenal juga sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

(Sumber: Persatuan Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung Tahun 2013)

Para PKL di Bandar Lampung tergabung dalam organisasi bernama Persatuan Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung (PPKL Bandar Lampung) yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. PPKL Bandar Lampung bersifat terbuka dengan berpedoman pada nilai-nilai adil, independen, mandiri dan solidaritas. PPKL Bandar Lampung bertujuan mewujudkan kehidupan pedagang kaki lima yang sejahtera dan partisipatif.

PPKL Bandar Lampung berusaha menjadi organisasi yang membela hak dan kepentingan pedagang kaki lima dan memiliki tugas pokok:

1. Memperjuangkan tempat usaha yang layak dan diakui keberadaannya
2. Menyelenggarakan pengorganisasian dan advokasi hukum bagi anggota
3. Menyelenggarakan dan memberikan pendidikan kritis bagi anggota serta memberikan penyebaran informasi tentang usaha kaki lima yang kritis Dan mencerdaskan anggota.
4. Menyelenggarakan pengumpulan aspirasi dan kepentingan PPKL melalui kegiatan organisasi.
5. Memberikan solidaritas kepada kelompok masyarakat lain yang senasib dan sepenanggungan.

Keanggotaan PPKL Bandar Lampung adalah organisasi-organisasi sector pedagang kaki lima. PPKL Bandar Lampung menghimpun organisasi sector wilayah pasar yang memiliki azas, nilai dan tujuan yang sama dengan Persatuan Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung (PPKL Bandar Lampung)

(Sumber: Persatuan Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung Tahun 2013)

Setiap anggota PPKL Bandar Lampung memiliki hak:

1. Mendapatkan pendidikan yang dilakukan organisasi
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
3. Mendapatkan advokasi hukum dalam setiap kasus yang berkenaan dengan pedagang kaki lima.
4. Memberikan aspirasi dan mengevaluasi kinerja pengurus
5. Mendapatkan pembelaan dan rehabilitasi
6. Mendapatkan kartu anggota setelah mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh organisasi dan berlaku selama 1 (satu) periode kepengurusan serta masih menjadi anggota.

(Sumber: Persatuan Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung Tahun 2013)

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, serta peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, selain itu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung juga merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Bandar Lampung.

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Praja Kota Bandar Lampung. Maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota Bandar Lampung untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menjalankan produk Hukum Daerah.

Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan Pelaksanaan ketentraman umum, serta penegakan produk Hukum Daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- c. Pelaksanakan Kebijakan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan aparat

Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Produk Hukum Daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah: Terwujudnya Lingkungan Yang Tertib dan Tentram.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan SDM yang berkompeten dibidangnya dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- b. Meningkatkan koordinasi antara lintas satuan kerja
- c. Meningkatkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban umum dan peraturan hukum daerah

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

4. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung menentukan sejumlah

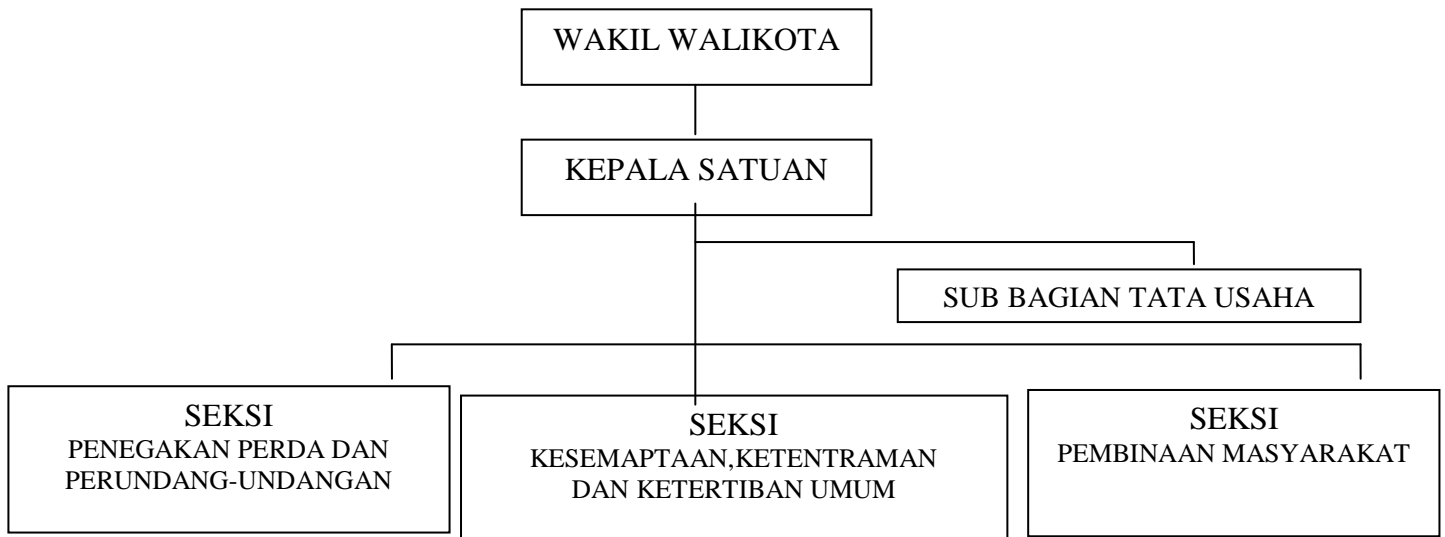
tujuan yang relevan untuk setiap misi yaitu:

- a. Tujuan yang hendak dicapai dari misi yang pertama adalah terwujudnya keterpaduan program penertiban ketentraman dan Penegakan Perda, Perlu adanya koordinasi yang terencana dan tepat arah, sehingga rencana yang ada akan dilaksanakan perlu dukungan dari seluruh satuan kerja di Kota Bandar Lampung agar dapat berjalan efektif dan efisien.
- b. Tujuan yang hendak dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya penertiban, pengawasan yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka personil yang duduk pada pemerintahan dituntut secara profesional untuk meningkatkan kinerja yang semaksimal mungkin.
- c. Tujuan yang hendak dicapai dari misi ketiga adalah agar sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai suatu keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan sarana yang telah diprogramkan setiap tahun.
- d. Tujuan yang hendak dicapai dari misi keempat adalah dengan adanya sosialisasi langsung atau melalui media cetak dan elektronik maka masyarakat akan berpartisipasi menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

5. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung dilaksanakan oleh para personil yang berjumlah 457 anggota, sedangkan secara organisatoris struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

6. Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Uraian tugas pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1) Kepala Satuan

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
- b. Perumusan Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugas
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan lingkungan tugasnya.
- d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan semua kegiatan satuan
- e. Pembinaan Pegawai dilingkungan Satuan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja.
- f. Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan
- c. Membuat pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum
- d. Membina dan mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
- e. Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum

3) Seksi penegakan perda dan perundang undangan

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan
- b. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat
- c. Melakukan penyidikan dan penindakan
- d. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah yang bersifat pembinaan/ non yustisi.
- e. Melakukan kordinasi denga Polri dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

4) Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- a. Menyusun Program Kegiatan Pembinaan kesamaptaan dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, pendidikan, dan keterampilan.
- c. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan anggota satuan

- d. Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas diruas jalan yang ada didalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu.
- e. Menjaga keamanan ditempat tempat hiburan, keramaian umum serta mengatur ketertiban pedagang kaki lima.
- f. Melaksanakan patroli ketertiban umum
- g. Melakukan kordinasi dengan instansi lain dalam rangka melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban.
- h. Melakukan penjagaan terhadap gedung/ kantor/rumah dinas pemerintah kota tersebut.
- i. Melaksanakan pengawalan terhadap penjaga kota, tamu dan penjaga penting.

5) Seksi Pembinaan Masyarakat

- a. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya bersama sama dengan instansi terkait.
- b. Menyusun dan Menginventarisir permasalahan dan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya.
- c. Melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja dalam rangka pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan pemantauan terhadap perizinan yang diberikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada maka sudah berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang sudah dibuat

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2013)